BUPATI TANA TORAJA

Yth. 1. Para Forkopimda Kabupaten Tana Toraja
2. Forum Kerukunan Umat Beragama
3. Para Staf Ahli Bupati
4. Para Asisten Setda
5. Para Pimpinan Instansi Vertikal
6. Para Kepala Perangkat Daerah
7. Para Camat, Lurah dan Kepala Lembang
8. Para Pimpinan/ Pengelola SPBU
se-Kabupaten Tana Toraja
di –
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 500/258/BAG.PEREKONOMIAN SDA/X/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : 500/248/BAG.PEREKONOMIAN SDA/X/2026 TENTANG PEMBATASAN PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI PADA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM

Dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
3. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Melalui Penyalur;
4. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100.3.4/12077/DESDM tentang Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
5. Hasil Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja bersama dengan Pimpinan/ Pengelola SPBU yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2026;
6. Hasil Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tana Toraja yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026.
7. Rekomendasi Komisi II DPRD Kabupaten Tana Toraja Nomor : 400.14.6/281/X/DPRD tanggal 22 Oktober 2026 Hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPRD Kabupaten Tana Toraja dengan Perangkat Daerah dan Pimpinan SPBU yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka menjaga penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang tetap sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat, serta untuk mengantisipasi terjadinya antrean panjang dan praktik rekayasa oknum tertentu dalam pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Tana Toraja, maka disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

A. Penerapan Sistem Ganjil Genap Pengisian BBM Subsidi :

1. Pemberlakuan Pelayanan sistem Ganjil-Genap pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU Kabupaten Tana Toraja;
2. Pelayanan Sistem Ganjil-Genap berdasarkan dengan penanggalan Masehi dan sifatnya situasional;
3. Sistem Ganjil-Genap sesuai dengan NOPOL dan STNK Kendaraan berdasarkan angka terakhir.
4. Jika Sistem Ganjil-Genap dimana tanggal yang berlaku pada saat ini Ganjil dan hari berikutnya juga Ganjil maka pelayanannya pada hari tersebut tidak diberlakukan Sistem Ganjil-Genap, contoh : pada hari ini tanggal 31(Ganjil) dan hari berikutnya tanggal 1 (Ganjil), maka tanggal 1 tidak berlaku Sistem Ganjil-Genap.

B. Pembatasan Pengisian BBM Subsidi Jenis Pertalite :

1. Kendaraan Roda Dua (Sepeda Motor) maksimal Rp. 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) per unit kendaraan per hari;
2. Kendaraan Roda Empat sesuai Kuota pada QR Code/ Barcode MyPertamina per unit kendaraan per hari.

C. Pembatasan Pengisian BBM Subsidi Jenis Biosolar :

Kendaraan Roda Empat ke atas sesuai Kuota pada QR Code/ Barcode MyPertamina per unit kendaraan per hari

D. Kewajiban dan Larangan Bagi Pengelola SPBU ;

1. Dilarang melayani pengisian BBM bersubsidi menggunakan jerigen atau wadah sejenis lainnya tanpa dilengkapi surat rekomendasi resmi dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Dilarang keras melayani pengisian BBM bersubsidi secara berulang terhadap kendaraan yang sama dalam waktu yang tidak wajar (indikasi pelangsiran);
3. Dilarang melayani pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan yang menggunakan QR Code/ Barcode MyPertamina yang tidak sesuai antara Nomor Polisi Kendaraan dengan data kendaraan pada system;
4. Dilarang melakukan pengisian BBM bersubsidi pada kendaraan yang menggunakan tangki yang telah di modifikasi/ ditambah kapasitasnya tidak sesuai standar pabrikan;
5. Wajib mengutamakan pengisian BBM bersubsidi kepada kendaraan layanan umum dan darurat meliputi : ambulance, mobil jenasah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, tanpa mengikuti sistem ganjil-genap;
6. Setelah diterbitkannya Surat Edaran ini, pihak pengelola SPBU wajib membuat baliho, stiker atau sejenisnya yang berisikan ketentuan surat edaran ini untuk dipampang di masing – masing SPBU, agar diketahui oleh masyarakat umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

E. Sanksi :

Apabila dalam pelaksanaan penyaluran BBM ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C dan D, maka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan :

1. Memberikan sanksi administratif berupa teguran, surat peringatan hingga pencabutan ijin dan atau menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pengelola SPBU atau pemilik kendaraan yang terbukti melakukan / memenuhi unsur pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merekomendasikan kepada PT. Pertamina Patra Niaga untuk memberikan sanksi Administratif berupa penghentian pasokan/ distribusi BBM kepada pengelola SPBU.

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 1 November 2026 dan akan dilakukan evaluasi lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal, 27 Oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Executive General Manager PT. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi;
4. Ketua DPD Hiswana Migas Sulawesi;
5. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab. Tana Toraja;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).